



# Jurnal Penelitian

# POLITIK

Vol.14, No.1, Juni 2017

## TRANSFORMASI IDENTITAS KEINDONESIAAN

- Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru
- Memaknai Kelas Menengah sebagai Aktor Demokrasi Indonesia
- Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara dan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) dalam Pemilu Pilkada DKI 2012
- Peranakan dan Serat Kekancangan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta
- Transformasi Pancasila dan Identitas Keindonesiaan

### RESUME PENELITIAN

- Peran Kerja sama IMT-GT dalam Pembangunan Konektivitas ASEAN
- Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan

### REVIEW BUKU

- Bahasa sebagai Arena dan Instrumen Kekuasaan

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 14	No. 1	Hlm. 1-108	Jakarta, Juni 2017	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	------------	-----------------------	-------------------

**Jurnal  
Penelitian Politik**



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial- politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

**Mitra Bestari**

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)  
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)  
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)  
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)  
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)  
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)  
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)

**Penanggung Jawab  
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI  
Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

**Dewan Redaksi**

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)  
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)  
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

**Redaksi Pelaksana**

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)  
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

**Sekretaris Redaksi**

Esty Ekawati, S.IP., M.IP  
Devi Darmawan, SH

**Produksi dan Sirkulasi**

Adiyatnika, A.Md  
Prayogo, S.Kom

**Alamat Redaksi**

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com  
*Website*: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

**ISSN**

1829-8001  
Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

## Jurnal Penelitian

# POLITIK

Vol. 14, No. 1, Juni 2017

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	i
<b>Catatan Redaksi</b>	iii
<b>Artikel</b>	
• <b>Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru</b> Aisah Putri Budiatri	1–15
• <b>Memaknai Kelas Menengah sebagai Aktor Demokrasi Indonesia</b> Wasisto Raharjo Jati	17–29
• <b>Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara dan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI): dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012</b> Dina Fadiyah	31–44
• <b>Peranakan dan Serat Kekancingan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta</b> Septi Satriani	45–54
• <b>Transformasi Pancasila dan Identitas Keindonesiaan</b> Siswanto	55–68
<b>Resume Penelitian</b>	
• <b>Peran Kerja Sama IMT-GT dalam Pembangunan Konektivitas ASEAN</b> Sandy Nur Ikfal Raharjo, dkk	69–83
• <b>Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan</b> Siswanto, dkk	85–98
<b>Review Buku</b>	
• <b>Bahasa sebagai Arena dan Instrumen Kekuasaan</b> Anggi Afriansyah	99–106
<b>Tentang Penulis</b>	107–108
<b>Pedoman Penulisan</b>	109–113

## CATATAN REDAKSI

Arus Globalisasi yang melanda dunia telah membawa perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Perubahan tersebut bisa bernilai positif jika globalisasi dimaknai secara bijak. Namun tak sedikit dampak negatif ditimbulkan oleh globalisasi akibat ketidakmampuan kita dalam memaknai dan menanggapi secara bijak. Indonesia, tak lepas dari arus globalisasi ini sehingga pola-pola perilaku masyarakat di segala aspek kehidupan pun bergeser. Kondisi ini memungkinkan terjadinya pergeseran identitas manusia baik itu akibat sosial-budaya maupun politik.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan identitas Keindonesiaan. Artikel pertama yang ditulis oleh Aisah Putri Budiatri, "Dikotomi Identitas Keindonesiaan Dan Kepapuaan Pasca Orde Baru", memperlihatkan bahwa dikotomi antitesis antara identitas kepapuaan dan keindonesiaan belum selesai, meskipun beberapa upaya penyelesaian konflik, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus, telah diterapkan. Sebaliknya, dikotomi identitas hari ini justru semakin menajam dan berpotensi memperkeruh konflik.

Artikel berikutnya, "Memaknai Kelas Menengah Sebagai Aktor Demokrasi Indonesia". Artikel yang ditulis oleh Wasisto Raharjo Jati ini membahas mengenai kelas menengah yang menjadi aktor baru dan menjadi identitas tersendiri dalam demokrasi di Indonesia. Tulisannya membahas mengenai akar demokrasi dalam setiap episode kemunculan kelas menengah dalam demokrasi Indonesia. Dan sejauh mana mereka ikut andil dalam proses demokratisasi di ruang publik. Sementara itu, artikel "Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara Dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012" yang ditulis oleh Dina Fadiyah menawarkan diskusi mengenai relasi antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-

Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012. temuan bahwa ternyata organisasi masyarakat dapat berperan penting dalam sebuah pemilihan. Terbukti dengan adanya elit-elit lokal yang saat ini gencar mengandeng ormas sebagai timsesnya. Keberhasilan pengumpulan suara yang dihasilkan oleh ormas mungkin karena anggota ormas banyak tersebar luas dimana-dimana. Mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dsb. Hal ini membuktikan bahwa ormas menjadi identitas yang ada saat ini sudah tidak dapat dikatakan independen atau tanpa adanya campur tangan politik.

Pergeseran identitas juga terjadi di Kraton Yogyakarta yang dibahas dalam artikel "Peranakan Dan Serat Kekancingan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta" yang ditulis oleh Septi Satriani. Artikel ini membahas bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas abdi dalem Kraton Yogyakarta. Seperti layaknya dalam organisasi modern, keanggotaannya ditandai dengan salah satunya seragam peranakan. Peranakan tidak sekedar menggambarkan seragam abdi dalem melainkan di dalamnya terkandung makna adanya persaudaraan dan persatuan dengan Raja maupun diantara sesama abdi dalem. Penulis menyimpulkan bahwa peranakan dan serat kekancingan merupakan symbol identitas bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Dengan menggunakan peranakan dan serat kekancingan maka abdi dalem Kraton Yogyakarta memiliki identitas yang berbeda dengan orang kebanyakan.

Artikel terakhir membahas tentang "Transformasi Pancasila Dan Identitas Keindonesiaan" yang ditulis oleh Siswanto. Pancasila sebagai rujukan kehidupan politik dan sosial semakin melemah di tengah gempuran globalisasi yang semakin kuat mempengaruhi pola pikir dan perilaku bangsa Indonesia. Karenanya, masyarakat Indonesia perlahan

bergerak menuju kondisi kehilangan identitas keindonesiaannya. Oleh karena itu, tulisan ini melihat pentingnya wacana transformasi Pancasila sehingga diharapkan bisa menjadi solusi atas tantangan kebangsaan tersebut. Transformasi Pancasila dapat dilakukan melalui (1) Transformasi bersifat menyeluruh atau holistik, tidak bisa bersifat parsial. (2) Transformasi juga meliputi perubahan pola pikir masyarakat (mindset). (3) Transformasi ini juga perlu di landasi oleh cahaya ilmu pengetahuan.

Selain kelima artikel terkait identitas di atas, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Artikel pertama ditulis oleh Sandy Nur Iqbal Raharjo, “Peran Kerja Sama IMT-GT Dalam Pembangunan Konektivitas Asean”. Tulisan ini menganalisis arti penting IMT-GT bagi masing-masing negara anggotanya, implementasi program-program IMT-GT tahun 2012-2016, dan peran IMT-GT dalam membangun konektivitas ASEAN, khususnya di sektor maritim.

Artikel kedua, “Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional Di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan”, ditulis oleh Siswanto. Artikel ini mengkaji arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di masa Reformasi. Seperti diketahui bahwa hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang sudah berlangsung sejak dekade 1950-an mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Sesuatu yang menggembirakan bahwa di era Reformasi ini kerja sama bilateral tersebut semakin meningkat khususnya dibidang politik dan ekonomi. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa kerjasama ini dihadapan kepada kondisi ketidakseimbangan (asymmetric power relations) yang berpengaruh terhadap posisi tawar (bargaining position) masing-masing negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan nasional (nasional power) yang lebih besar akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan dengan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan nasional lebih kecil. Untuk mengimbangi hal itu, posisi Indonesia

sebagai negara kekuatan menengah (middle power) bisa menjadi instrumen strategi dalam menghadapi Tiongkok.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan review buku karya Fathur Rokhman & Surahmat “Bahasa Sebagai Arena Dan Instrumen Kekuasaan”. Review yang ditulis Anggi Afriansyah menelaah politik penggunaan bahasa dari beragam aspek. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi tetapi lebih dari itu, bahasa dapat menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan. Bahasa beroperasi sebagai piranti kekuasaan dan berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh mereka yang memiliki niat berkuasa. Bahasa dapat digunakan untuk praktik dominasi, alat pergerakan, melanggengkan kekuasaan, mendulang suara dan memenangkan pemilihan, sampai meraih keuntungan materil.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai identitas Keindonesiaan. Selamat membaca.

## **Redaksi**

## Jurnal Penelitian

# POLITIK

Vol. 14, No. 1, Juni 2017

---

**DDC: 320.54 : 352.14**

**Aisah Putri Budiatri**

### **DIKOTOMI IDENTITAS KEINDONESIAAN DAN KEPAPUAAN PASCA ORDE BARU**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 1-15**

Narasi tentang dikotomi identitas keindonesiaan dan kepapuaan mewarnai hampir di setiap analisis mengenai identitas politik Papua. Kajian pendahulu berfokus pada pembahasan tentang pengalaman kolonial Belanda, sejarah integrasi Papua dan kegagalan pembangunan masa Orde Baru yang menjadi alasan kunci lahirnya pembelahan identitas antara keindonesiaan dan kepapuaan di Tanah Papua. Masa kolonial dan Orde Baru menjadi fokus studi mereka, karena pada masa ini identitas kepapuaan sebagai antitesis keindonesiaan lahir dan tumbuh semakin tajam. Lalu bagaimana dengan Pasca-Orde Baru? Tulisan ini memperlihatkan bahwa dikotomi antitesis antara identitas kepapuaan dan keindonesiaan belum selesai, meskipun beberapa upaya penyelesaian konflik, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus, telah diterapkan. Sebaliknya, dikotomi identitas hari ini justru semakin menajam dan berpotensi memperkeruh konflik.

**Kata kunci:** identitas, Papua, kepapuaan, keindonesiaan, konflik, paska Orde Baru

---

**DDC: 305.5**

**Wasisto Raharjo Jati**

### **MEMAKNAI KELAS MENENGAH SEBAGAI AKTOR DEMOKRASI INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 17-29**

Tulisan ini hendak menganalisis mengenai kelas menengah sebagai aktor demokrasi di Indonesia. Membicarakan kelas menengah dalam setiap diskursus ilmu sosial dan politik di Indonesia senantiasa dihadapkan pada pembahasan ekonomi secara kuantitatif. Hal yang perlu dicatat adalah keberadaan kelas menengah ini daripada didefinisikan lebih baik dirasakan keberadaannya dalam kehidupan. Posisi kelas menengah sebagai aktor politik di Indonesia masih fluktuatif. Hal ini dikarenakan kemunculan kelas menengah dalam arus demokrasi Indonesia yang masih ambigu. Kelas menengah ini bisa menjadi kelompok masyarakat yang ter subordinasi dengan negara, namun di satu sisi, kelas menengah juga tampil sebagai kelas masyarakat yang resisten dengan negara. Adanya transisi posisi dan status kelas menengah tersebut sebenarnya bisa disimak dari gerakan reformasi 1998 hingga sekarang ini. Munculnya berbagai macam gerakan politik dengan mengarustamakan demokrasi yang diinisiasi oleh kelas menengah menjadi hal yang terelakkan pasca reformasi ini. Semula, gerakan tersebut hanya berupa aksi penyampaian aspirasi dan kini sudah berkembang menjadi menjadi aksi penuntutan representasi. Adanya perubahan dalam pilihan aksi dan strategi itu menandakan bahwa kesadaran politik di kalangan kelas menengah Indonesia sendiri sudah semikian merata. Mereka tidak hanya menjadi aktor pasif secara politis namun juga aktif dalam menyuarakan aspirasi dan sekaligus pula representasinya. Menguatnya aksi representasi dari kelas menengah ini merupakan implikasi penting semakin menguatnya ranah societal terhadap

proses political, dan semakin berperannya netizen dalam menyuarakan kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai akar demokrasi dalam setiap episode kemunculan kelas menengah dalam demokrasi Indonesia. Sejauh mana mereka andil dalam proses demokratisasi di ruang publik.

**Kata kunci:** Demokratisasi, Kelas Menengah, Masyarakat

---

**DDC: 324.6**

**Dina Fadiyah**

**KUASA MERAH SUARA: RELASI  
FOKE-NARA DAN FORUM  
KOMUNIKASI ANAK BETAWI  
(FORKABI) DALAM PEMILUKADA  
DKI JAKARTA 2012**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 31-44**

Tulisan ini bermaksud melihat relasi antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilu DKI Jakarta 2012. Pada dasarnya, Forkabi berdiri karena ketakutan etnis asli Jakarta yaitu etnis Betawi akan luntur karena banyaknya suku pendatang yang ada di Jakarta. Forkabi yang awalnya berdiri berdasarkan etnisitas tetapi kemudian menjelma menjadi perpanjangan politik dari suatu elit lokal. Ormas yang seharusnya bebas dari kepentingan-kepentingan politik, justru menjadi perpanjangan politik dari Foke-Nara selama masa kampanye dalam pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan didapatkan temuan bahwa ternyata organisasi masyarakat dapat berperan penting dalam sebuah pemilihan. Terbukti dengan adanya elit-elit lokal yang saat ini gencar mengandeng ormas sebagai timsesnya. Keberhasilan pengumpulan suara yang dihasilkan oleh ormas mungkin karena anggota ormas banyak tersebar luas dimana-mana. Mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dsb. Hal ini membuktikan bahwa ormas yang ada saat ini sudah tidak dapat dikatakan independen atau tanpa adanya campur tangan politik.

**Kata kunci:** Ormas, Forkabi, Patron, Klien

---

**DDC: 302.3**

**Septi Satriani**

**PERANAKAN DAN SERAT  
KEKANCINGAN: SEBUAH  
IDENTITAS ABDI DALEM KRATON  
YOGYAKARTA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 45-54**

Tulisan ini berisi tentang bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas abdi dalem Kraton Yogyakarta. Seperti layaknya dalam organisasi modern, keanggotaannya ditandai dengan salah satunya seragam peranakan. Peranakan tidak sekedar menggambarkan seragam abdi dalem melainkan di dalamnya terkandung makna adanya persaudaraan dan persatuan dengan Raja maupun diantara sesama abdi dalem. Penulis menyimpulkan bahwa peranakan dan serat kekancingan merupakan symbol identitas bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Dengan menggunakan peranakan dan serat kekancingan maka abdi dalem Kraton Yogyakarta memiliki identitas yang berbeda dengan orang kebanyakan.

**Kata kunci :** Identitas, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Peranakan, Serak Kekancingan

---

**DDC: 320.509598**

**Siswanto**

**TRANSFORMASI PANCASILA DAN  
IDENTITAS KEINDONESIAAN**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 55-68**

Ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup semakin lama semakin ditinggalkan oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai rujukan kehidupan politik dan sosial semakin melemah di tengah gempuran globalisasi yang semakin kuat mempengaruhi pola pikir dan perilaku bangsa Indonesia. Karenanya, masyarakat Indonesia perlahan bergerak menuju kondisi kehilangan identitas keindonesiaannya. Oleh karena itu, tulisan ini melihat pentingnya wacana transformasi Pancasila sehingga diharapkan bisa menjadi solusi

atas tantangan kebangsaan tersebut. Transformasi Pancasila dapat dilakukan melalui (1) Transformasi bersifat menyeluruh atau holistik, tidak bisa bersifat parsial. (2) Transformasi juga meliputi perubahan pola pikir masyarakat (mindset). (3) Transformasi ini juga perlu di landasi oleh cahaya ilmu pengetahuan.

**Kata kunci:** Globalisasi, Identitas Keindonesiaan, Transformasi Pancasila

---

**DDC: 327**

**Sandy Nur Ikfal Raharjo**

### **PERAN KERJA SAMA IMT-GT DALAM PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS ASEAN**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 69-83**

*Indonesia-Malaysia—Thailand Growth Triangle* (IMT-GT) merupakan salah satu kerja sama ekonomi subregional yang diakui oleh ASEAN berperan penting dalam membangun konektivitas ASEAN. Namun demikian, perbedaan karakter geografis dan perbedaan kepentingan antartiga negara anggotanya berpeluang menghambat implementasi IMT-GT dalam membangun konektivitas tersebut. Studi ini difokuskan pada tiga hal, yaitu arti penting IMT-GT bagi masing-masing negara anggotanya, implementasi program-program IMT-GT tahun 2012-2016, dan peran IMT-GT dalam membangun konektivitas ASEAN, khususnya di sektor maritim. Melalui metode kualitatif bersifat deskriptif korelatif, studi ini menemukan bahwa IMT-GT berkontribusi hampir 50% bagi perekonomian Malaysia, mendukung visi Poros Maritim Dunia bagi Indonesia, serta mendorong kemajuan wilayah Thailand Selatan yang relatif tertinggal. Temuan lainnya, capaian program IMT-GT 2012-2016 masih rendah, terutama di sisi Indonesia akibat terlalu banyaknya program yang dicanangkan. Terakhir, IMT-GT berperan dalam membangun konektivitas ASEAN melalui pengembangan lima koridor ekonomi, walaupun masih lebih dominan pada dimensi darat dibanding dimensi maritim.

**Kata kunci:** ASEAN, IMT-GT, konektivitas, dan maritim

---

**DDC: 327.51**

**Siswanto**

### **POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP TIONGKOK: MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN NASIONAL DI TENGAH KETIDAKSEIMBANGAN KEKUATAN**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 85-98**

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di masa Reformasi. Seperti diketahui bahwa hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang sudah berlangsung sejak dekade 1950-an mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Sesuatu yang menggembarakan bahwa di era Reformasi ini kerja sama bilateral tersebut semakin meningkat khususnya dibidang politik dan ekonomi. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa kerja sama ini dihadapan kepada kondisi ketidakseimbangan (*asymmetric power relations*) yang berpengaruh terhadap posisi tawar (*bargaining position*) masing-masing negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan nasional (*nasional power*) yang lebih besar akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan nasional lebih kecil. Untuk mengimbangi hal itu, posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah (*middle power*) bisa menjadi instrumen strategi dalam menghadapi Tiongkok. Keberadaan sebagai kekuatan menengah didasarkan pada pada sejumlah indentifikasi yaitu kapasitas yang dimiliki dan perilaku politiknya dalam hubungan internasional sebagai inisiator diplomatik dalam mewujudkan stabilitas/keamanan dan perdamaian di kawasan. Akhirnya, sebagai penutup bahwa tulisan ini diharapkan akan memberi masukan terhadap arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok sehingga lebih memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya terhadap Tiongkok di tengah-tengah ketidak seimbangan kekuatan tersebut.

**Kata kunci:** Politik luar negeri, ketidakseimbangan kekuatan, kepentingan nasional



---

**DDC: 302.222**

**Anggi Afriansyah**

**BAHASA SEBAGAI ARENA DAN  
INSTRUMEN KEKUASAAN**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 99-106**

Buku ini menelaah politik penggunaan bahasa dari beragam aspek. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi tetapi lebih dari itu, bahasa dapat menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan. Bahasa beroperasi sebagai piranti kekuasaan dan berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh mereka yang memiliki niat berkuasa. Bahasa dapat digunakan untuk praktik dominasi, alat pergerakan, melanggengkan kekuasaan, mendulang suara dan memenangkan pemilihan, sampai meraih keuntungan materil.

**Kata kunci:** bahasa, politik, kekuasaan, Indonesia

---

**DDC: 320.54 : 352.14**

**Aisah Putri Budiatri**

## **THE DICHOTOMY OF INDONESIAN AND PAPUAN IDENTITIES IN THE POST-NEW ORDER ERA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 1-15**

*The narratives about the dichotomy of Indonesian and Papuan identities are almost founded in every analysis of Papuan political identity. The previous research emphasis on the discussion about the Dutch colonial experience, the history of Papua's integration into Indonesia and the failure of development under New Order era as the key reasons for the genesis of the dichotomy. The colonial periode and New Order era have become their research focus since the Papuan identity as an antithesis of Indonesian-ness was born and grew under this political period. Then, how is about the political identities in Papua under Post-New Order? This article shows that the antithesis dichotomy between Papuan and Indonesian identities still occurs, even though several policies to resolve the conflict, including the Special Autonomy Law, have been implemented. In fact, the dichotomy of identities in Papua has sharpened and potentially worsened the conflict.*

**Keywords:** *identity, Papua, Papuan-ness, Indonesian-ness, conflict, post-New Order*

---

**DDC: 305.5**

**Wasisto Raharjo Jati**

## **UNDERSTANDING INDONESIAN MIDDLE CLASS AS DEMOCRACY**

## **PILLAR IN INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 17-29**

*This article is aims to analyse middle class as one of the main actors in Indonesian democratization process. Discussion on middle class studies in Indonesian social and political science discourse have been dominated economic understanding based quantitative method. It was an academic challenges for Indonesian social scientist to redefine terminology of middle class. The position of middle class as the political actor in Indonesia still fluctuated due to unclearly standing in terms of relation state and society. On one hand, the middle class could perform as resistant groups against the political regime. In other hand, the Indonesian middle class presumably become subordinated groups towards the political regime. It can be indicated in Indonesia post Authoritarian era, the middle class groups performs itself as the political initiator from grass roots level. That main motivation from Indonesian middle class in recent political era are make alternative representation in order to articulate aspiration. The emergence of internet especially social media have been perceived as political machine that stimulated middle class to make critical points toward government today.*

**Keyword:** *Democratization, Middle Class, Society.*

---

**DDC: 324.6**

**Dina Fadiyah**

## **UNDERSTANDING INDONESIAN MIDDLE CLASS AS DEMOCRACY PILLAR IN INDONESIA**

*This paper intends to see the relationship between Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) with Forkabi in Jakarta 2012 Election. Basically, Forkabi stand up because they felt treat from immigrants. Forkabi originally founded on ethnicity but later transformed into a political extension of a local elite. CSOs that were supposed to be free of political interests, became the political extension of Foke-Nara during the campaign period in the 2012 Jakarta Governor election. This paper uses descriptive qualitative method and found that community organizations can play an important role in a local election. Proven with the local elites are currently aggressively used organizations as the tim to win the election. The success of this case because members of mass organizations are widespread everywhere. Starting from the level of RT, RW, Village, District, etc. This proves that the existing mass organizations can not be independent or do not have political interest.*

**Keywords:** Mass Organization, Forkabi, Patron, Client.

---

**DDC: 302.3**

**Septi Satriani**

**PERANAKAN AND SERAT  
KEKANCINGAN: AN IDENTITY OF  
“ABDI DALEM” IN YOGYAKARTA  
PALACE**

*This paper focus on how the concept of peranakan and serat kekancingan became the identity of abdi dalem of Kraton Yogyakarta. Peranakan is not just a uniform but the symbol of brotherhood and control of behavior. I assume that the peranakan and serat kekancingan is a symbol of identity. When the abdi dalem wearing a peranakan and having serat kekancingan,, they will behave according to the value that contained by them.*

**Keywords:** Identity, Abdi Dalem in Yogyakarta Palace, Peranakan, Serat Kekancingan

---

**DDC: 320.509598**

**Siswanto**

**THE TRANSFORMATION OF  
PANCASILA AND INDONESIAN  
IDENTITY**

*The ideology of Pancasila as the basis of the state and the worldview is increasingly abandoned by the Indonesian nation. Pancasila as a reference of political and social life is weakening in the midst of globalization that influence the mindset and behavior of the Indonesian people. Therefore, the people of Indonesia move to the condition that they lost of Indonesian Identity. This paper sees the importance of discourse about transformation of Pancasila, so that it is expected to be a solution to the challenge of nationality. Transfromasi Pancasila can be done through (1) Transformation is holistic, can not be partial. (2) Transformation also involves about changing the mindset of the community. (3) This transformation also needs to be grounded by the light of science.*

**Keywords:** Globalization, Indonesia Identity, Transformation of Pancasila

---

**DDC: 327**

**Sandy Nur Ikfal Raharjo**

**THE ROLE OF IMT-GT  
COOPERATION IN THE ASEAN  
CONNECTIVITY DEVELOPMENT**

*Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) is recognized as one of the sub-regional cooperation to support ASEAN Community. However, geographical character differences and consequently creating different interests among three member states, is likely to hinder the implementation of the IMT-GT in establishing such connectivity. This study focuses on three issues, namely, the significance of IMT-GT for each member state, implementation of IMT-GT's programs in 2012-*

2016, and the role of IMT-GT in building ASEAN connectivity, particularly in the maritime sector. Through correlative descriptive qualitative method, this study found that the IMT sub-region contributes nearly 50% for the Malaysian economy, supports the Indonesian vision of Global Maritime Fulcrum for Indonesia, as well as encourages the development of less-developed Southern Thailand region. In Addition, the implementation of IMT-GT's programs in 2012-2016 was still low, especially on the side of Indonesia due to too many programs were planned. Another finding was that IMT-GT has played significant role in building the ASEAN connectivity through the development of five economic corridors, although it was still more on land connectivity rather than maritime connectivity.

**Keywords:** ASEAN, IMT-GT, connectivity, and maritime

---

**DDC: 327.51**

**Siswanto**

**INDONESIAN FOREIGN POLICY  
TOWARD CHINA:  
FIGHTING THE NATIONAL  
INTERESTS IN ASYMMETRIC  
POWER RELATIONS**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 85-98**

*This paper would like to describe Indonesia's foreign policy towards China in the Reform period. As we known that Indonesia-China bilateral relations have been going on since the 1950s. The relations have ups and downs condition in accordance with the dynamics of domestic politics of each country. It is exciting that in Reform period that bilateral cooperation has been increasing especially in the field of politics and economy. In other hand, there is obstacle in this bilateral cooperation. The cooperation based on imbalance power relation (asymmetric power relations) which will affect to the bargaining position of each country in struggling for national interests. China as a nation with greater national power will be easier in fighting for its national interests compared to Indonesia as a country with smaller national power. To solve the obstacle, Indonesia's position as a middle power country can be a strategic instrument in facing China. Position as an middle power is based on a number of identifications of its capacity and political behavior in international relations*

*such as ; a diplomatic initiator in realizing stability / security and peace in the region. Finally, in closing remark that this paper is expected to give input to the direction of Indonesian foreign policy towards China so that it has more bargaining position in fighting its national interests against China in the midst of imbalance power (asymmetric power relations)*

**Keywords:** Foreign policy, power imbalance, national interest

---

**DDC: 302.222**

**Anggi Afriansyah**

**LANGUAGE AS FIELD AND  
INSTRUMENTS OF POWER**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 99-106**

*This book examines the use of language in variety aspects of life. Language is not only used as a medium of communication but more than that, can be an effective tool to gain power. Language operates as an instrument of power and successfully utilized optimally by those who have the intention to to get power. Language can be used to dominate others, means of struggle, preserve power, won the election, and achieve economic benefits.*

**Keywords:** Language, politic, power, Indonesia

**RESUME PENELITIAN**  
**PERAN KERJA SAMA IMT-GT DALAM PEMBANGUNAN**  
**KONEKTIVITAS ASEAN<sup>1</sup>**

**RESEARCH SUMMARY**  
**THE ROLE OF IMT-GT COOPERATION IN THE ASEAN**  
**CONNECTIVITY DEVELOPMENT**

**Sandy Nur Ikfal Raharjo, Awani Irewati, Agus R. Rahman, Tri Nuke Pudjiastuti,**  
**CPF Luhulima, Hayati Nufus**

Pusat Penelitian Politik- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Email: sandy.raharjo@gmail.com

Diterima: 8 Maret 2017; direvisi: 6 April 2017; disetujui: 29 Juni 2017

**Abstract**

*Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) is recognized as one of the sub-regional cooperation to support ASEAN Community. However, geographical character differences and consequently creating different interests among three member states, is likely to hinder the implementation of the IMT-GT in establishing such connectivity. This study focuses on three issues, namely, the significance of IMT-GT for each member state, implementation of IMT-GT's programs in 2012-2016, and the role of IMT-GT in building ASEAN connectivity, particularly in the maritime sector. Through correlative descriptive qualitative method, this study found that the IMT sub-region contributes nearly 50% for the Malaysian economy, supports the Indonesian vision of Global Maritime Fulcrum for Indonesia, as well as encourages the development of less-developed Southern Thailand region. In Addition, the implementation of IMT-GT's programs in 2012-2016 was still low, especially on the side of Indonesia due to too many programs were planned. Another finding was that IMT-GT has played significant role in building the ASEAN connectivity through the development of five economic corridors, although it was still more on land connectivity rather than maritime connectivity.*

**Keywords:** ASEAN, IMT-GT, connectivity, and maritime

**Abstrak**

*Indonesia-Malaysia—Thailand Growth Triangle (IMT-GT) merupakan salah satu kerja sama ekonomi subregional yang diakui oleh ASEAN berperan penting dalam membangun konektivitas ASEAN. Namun demikian, perbedaan karakter geografis dan perbedaan kepentingan antartiga negara anggotanya berpeluang menghambat implementasi IMT-GT dalam membangun konektivitas tersebut. Studi ini difokuskan pada tiga hal, yaitu arti penting IMT-GT bagi masing-masing negara anggotanya, implementasi program-program IMT-GT tahun 2012-2016, dan peran IMT-GT dalam membangun konektivitas ASEAN, khususnya di sektor maritim. Melalui metode kualitatif bersifat deskriptif korelatif, studi ini menemukan bahwa IMT-GT berkontribusi hampir 50% bagi perekonomian Malaysia, mendukung visi Poros Maritim Dunia bagi Indonesia, serta mendorong kemajuan wilayah Thailand Selatan yang relatif tertinggal. Temuan lainnya, capaian program IMT-GT 2012-2016 masih rendah, terutama di sisi Indonesia akibat terlalu banyaknya program yang dicanangkan. Terakhir, IMT-GT berperan dalam membangun konektivitas ASEAN melalui pengembangan lima koridor ekonomi, walaupun masih lebih dominan pada dimensi darat dibanding dimensi maritim.*

**Kata Kunci:** ASEAN, IMT-GT, konektivitas, dan maritim

---

<sup>1</sup> Artikel ini dibuat berdasarkan hasil penelitian Tim Perbatasan P2P LIPI yang dilakukan oleh Sandy Nur Ikfal Raharjo (Koordinator), Awani Irewati, Agus R. Rahman, Tri Nuke Pudjiastuti, CPF Luhulima, dan Hayati Nufus.

## Pendahuluan

Komunitas ASEAN mulai diberlakukan sejak tahun 2016. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaannya, keterhubungan/konektivitas wilayah antarnegara anggota menjadi faktor kunci. *Master Plan on ASEAN Connectivity* sudah merumuskan bahwa salah satu cara mewujudkan konektivitas adalah melalui sinkronisasi dengan beberapa kerja sama subregional di Asia Tenggara.<sup>2</sup>

Salah satu kerja sama subregional yang berpotensi mendorong pembangunan konektivitas ASEAN dan diakui dalam *Master Plan on ASEAN Connectivity* adalah *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle* (IMT-GT).<sup>3</sup> Kerja sama ini meliputi 32 provinsi/ negara bagian dengan jumlah populasi sekitar 70 juta jiwa, terdiri atas 10 provinsi Indonesia, 8 negara bagian Malaysia, dan 14 provinsi Thailand. IMT-GT mempromosikan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor swasta dengan penekanan pada keunggulan komplementer dan keunggulan komparatif negara-negara anggotanya.<sup>4</sup>

Dalam hal konektivitas, IMT-GT juga mencanangkan pembangunan koridor ekonomi. Dalam Cetak Biru Pelaksanaan IMT-GT 2012-2016, ada lima koridor yang dikembangkan. Pertama, koridor Songkhla-Penang-Medan yang menghubungkan Thailand-Malaysia via darat dan Malaysia-Indonesia via laut. Kedua, koridor Selat Malaka, meliputi sabuk pantai barat dari Trang di Thailand bagian selatan hingga Malaka di Semenanjung Malaysia. Ketiga, koridor ekonomi Banda Aceh-Medan-Pekanbaru-Palembang, yang membangun jalur darat dari utara hingga selatan Pulau Sumatra. Keempat, koridor ekonomi Malaka-Dumai, yaitu jalur laut yang menghubungkan Sumatra dengan Semenanjung Malaysia. Kelima, koridor ekonomi Ranong-Phuket-Aceh, yang akan menghubungkan Indonesia dengan Thailand via laut.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> ASEAN, *Master Plan on ASEAN Connectivity*, (Ha Noi: ASEAN, 2010).

<sup>3</sup> ASEAN, *Master Plan on ASEAN Connectivity*, hlm. 31.

<sup>4</sup> IMT-GT, "About IMT-GT", <http://www.imtgt.org/About.htm>, diakses pada 5 Februari 2016.

<sup>5</sup> IMT-GT, *IMT-GT Implementation Blueprint 2012-2016*, (Phnom Penh: IMT-GT, 2012).

Selain IMT-GT, masih ada beberapa kerja sama subregional maupun kerja sama segitiga pertumbuhan di sekitar wilayah tersebut, misalnya, kerja sama *Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) berikut kawasan Sijori-nya (Singapura-Johor-Riau). Ada pula kerja sama *Indian Ocean Rim Association* (IORA), di mana Indonesia, Malaysia, dan Thailand juga menjadi anggotanya.<sup>6</sup> Namun dalam konteks konektivitas ASEAN, dua kerja sama terakhir tidak disebutkan di dalam *Master Plan on ASEAN Connectivity* 2010 sebagai kerja sama subregional yang utama.

Setidaknya ada tiga alasan mengapa kerja sama ekonomi subregional antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand tersebut menarik untuk dipahami lebih lanjut. *Pertama*, dari sisi geografis, sebagian wilayah tiga negara tersebut terhubung oleh lautan, di mana pembangunan konektivitas antarwilayah tersebut diasumsikan akan lebih sulit, lama, dan mahal. *Kedua*, wilayah perbatasan maritim tiga negara tersebut meliputi Selat Malaka yang merupakan salah satu selat tersibuk di dunia dan menjadi barometer kesehatan perdagangan dunia.<sup>7</sup> *Ketiga*, kerja sama subregional tiga negara pendiri ASEAN ini dapat menjadi model/ccontoh bagi negara anggota ASEAN lainnya.<sup>8</sup> *Keempat*, dalam konteks kepentingan Indonesia sekarang ini, pembangunan konektivitas (maritim) tersebut berkaitan dengan cita-cita Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.

Kehadiran kerja sama subregional IMT-GT menimbulkan optimisme tersendiri terhadap pembangunan konektivitas maritim di wilayah tersebut, seperti halnya yang sudah dikontribusikan oleh kerja sama ekonomi GMS terhadap konektivitas darat di subregional Mekong. Namun demikian, masih ada beberapa permasalahan yang perlu ditelaah lebih lanjut.

<sup>6</sup> Indian Ocean Rim Association, "IORA Membership", <http://www.iora.net/about-us/membership.aspx>, diakses pada 8 Februari 2016.

<sup>7</sup> Marcus Hand, "Malacca Straits transits hit all time high in 2013, pass 2008 peak", 10 Februari 2014, <http://www.seatrade-maritime.com/news/asia/malacca-straits-transits-hit-all-time-high-in-2013-pass-2008-peak.html>, diakses pada 8 Februari 2016.

<sup>8</sup> ASEAN, *Master Plan on ASEAN Connectivity*, hlm. 35.

*Pertama*, terdapat perbedaan status antara Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) dengan Malaysia dan Thailand yang merupakan negara pantai (*coastal state*), yang cara pandang dan kebijakannya dalam memandang kawasan perbatasan lautnya akan berbeda pula. *Kedua*, IMT-GT telah menetapkan *Implementation Blueprint* untuk periode 2012-2016 sebagai acuan bagi pelaksanaan program-programnya. Untuk itu, perlu ada evaluasi bagaimana pelaksanaannya di lapangan. *Ketiga*, belum diketahui bagaimana kontribusi program koridor ekonomi IMT-GT dalam membangun konektivitas maritim ASEAN di antara tiga negara tersebut, baik dalam dimensi fisik, kelembagaan, maupun antarmasyarakat.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan penelitian, yaitu 1) sejauh mana nilai strategis kerja sama subregional IMT-GT bagi masing-masing negara anggotanya? 2) bagaimana pelaksanaan dan kemajuan kerja sama IMT-GT selama periode 2012-2016? 3) bagaimana peran kerja sama IMT-GT dalam membangun konektivitas ASEAN, khususnya maritim? Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih akurat mengenai optimalisasi kerja sama subregional dalam membangun konektivitas dan mendukung Komunitas ASEAN.

## **Kerangka Konseptual**

Penelitian ini menggunakan dua variabel utama dalam menganalisis IMT-GT, yaitu sebagai sebagai kerja sama subregional dan sebagai sarana membangun konektivitas. Untuk menjelaskan dua variabel di atas, tulisan ini menggunakan dua konsep, yaitu subregionalisme dan konektivitas.

### **a. Subregionalisme**

Terminologi subregional dan subregionalisme tidak hanya memiliki makna geografis, tetapi juga berkonotasi politis.<sup>9</sup> Dalam berbagai literatur,

<sup>9</sup> Artatrana Gochhayat, "Regionalism and Sub-regionalism: A Theoretical Framework with Special Reference to India", *African Journal of Political Science and International Relations*, Vol. 8, No.1, (Februari 2014), hlm. 12.

penulis masih belum menemukan definisi subregionalisme yang relatif mapan. Konsep subregionalisme belum berdiri sendiri dan selalu dikaitkan dengan regionalisme, tetapi dalam lingkup ruang yang lebih kecil. Regionalisme sendiri dalam level internasional merujuk pada kerja sama transnasional untuk mencapai tujuan bersama atau untuk menyelesaikan masalah bersama, atau dapat pula berarti upaya meningkatkan hubungan antara negara-negara yang terhubung secara geografi, sejarah, dan ekonomi.<sup>10</sup>

Lalu, bagaimana cara mengukur keberhasilan pembangunan kawasan? Salah satu ukuran yang dapat digunakan adalah kehadiran rezim dan integrasi regional di kawasan tersebut. Rezim sendiri didefinisikan sebagai seperangkat aturan, norma budaya atau sosial yang mengatur jalannya pemerintahan dan interaksinya dengan masyarakat. Adapun integrasi regional bermakna sebuah proses di mana negara-negara memasuki perjanjian kawasan demi meningkatkan kerja sama regional melalui (penciptaan) institusi dan aturan-aturan.<sup>11</sup> Dengan kata lain, kepatuhan kepada nilai, norma dan aturan serta kehadiran institusi menjadi indikator keberhasilan pembangunan kawasan tersebut.

Lebih lanjut, menyadari adanya peran *Asian Development Bank* dalam mendukung berbagai kerja sama subregional seperti GMS, IMT-GT, dan BIMP-EAGA, ada tiga jenis regionalisme menurut *Asian Development Bank* yang dapat dirujuk. *Pertama*, regionalisme dalam bentuk kerja sama regional yang didefinisikan sebagai interaksi antarpemerintah nasional di mana implementasinya sepenuhnya diserahkan kepada level nasional, zzzhhmisalnya berupa konferensi, pertemuan, forum, dan bentuk lain yang sejenis. Untuk menjamin pengawasan pelaksanaannya, biasanya dibentuk kelompok kerja dan komite.<sup>12</sup> *Kedua*, penyediaan layanan regional (*regional provision of services*), di mana negara-negara membentuk badan regional yang hanya menyediakan layanan-layanan tertentu, di

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>12</sup> Asian Development Bank dan Commonwealth Secretariat, *Toward a New Pacific Regionalism*, (Mandaluyong City, Philippines: ADB, 2005), hlm. 53.

mana kekuasaan untuk membuat kebijakan tetap berada di pemerintah nasional masing-masing. Jenis layanan yang disediakan dapat berupa layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan maupun layanan komersial seperti transportasi dan layanan impor.<sup>13</sup> *Ketiga*, integrasi pasar regional (*regional market integration*), yaitu penghilangan hambatan-hambatan antarpasar di negara-negara anggota, baik yang berupa hambatan tarif maupun nontarif. Standarisasi biasanya dibutuhkan untuk memfasilitasi penyediaan layanan yang tersentralisasi, tetapi tidak perlu diikuti dengan liberalisasi pasar.<sup>14</sup>

Terkait dengan peran subregionalisme, kajian Cottey tentang subregionalisme di Eropa memperlihatkan bahwa kerja sama-kerja sama subregional dapat berperan dalam membangun jembatan hubungan, membantu mengintegrasikan negara anggota kerja sama subregional dengan kerja sama kawasan induknya, menjadi kerangka dalam mengatasi tantangan kebijakan transnasional, dan memfasilitasi reformasi politik, ekonomi, dan kelembagaan di negara-negara yang berpartisipasi.<sup>15</sup>

## b. Konektivitas/Keterhubungan

Dalam konteks dokumen *the Master Plan on ASEAN Connectivity 2011-2015*, konektivitas merujuk pada berbagai rencana aksi untuk menghubungkan (negara-negara anggota) ASEAN melalui tiga strategi. *Pertama*, pembangunan infrastruktur fisik (*physical connectivity*). Strategi ini dititikberatkan pada pembangunan sistem transportasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta kerangka keamanan energi regional. Yang *kedua* adalah pembangunan lembaga, mekanisme, dan proses yang efektif (*institutional connectivity*) yang dilakukan melalui penyelesaian berbagai hambatan dalam pergerakan barang dan orang, fasilitasi perdagangan dan investasi intra-ASEAN, harmonisasi prosedur yang standar dan seragam, serta operasionalisasi

berbagai kesepakatan untuk mengurangi biaya pemindahan barang secara lintas batas. *Ketiga*, pembangunan masyarakat yang terberdayakan (*people-to-people connectivity*) dalam rangka mempromosikan interaksi sosial dan budaya intra-ASEAN yang lebih dalam. Dengan konektivitas tersebut, diharapkan bahwa jaringan produksi dan distribusi di kawasan ASEAN akan semakin dalam, luas, dan mengakar di dalam perekonomian global.

Berdasarkan dua konsep tentang subregionalisme dan konektivitas di atas, dapat dirumuskan bahwa kerja sama IMT-GT adalah kerja sama internasional yang dilakukan secara trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk mencapai kepentingan atau tujuan bersama. Kerja sama trilateral tersebut diwujudkan dalam bentuk subregionalisme yang merujuk pada proses pembangunan subregional (*subregion building*) yang diharapkan tidak hanya berdampak pada subkawasan tersebut secara khusus, tetapi juga kawasan Asia Tenggara secara umum. Tujuan bersamanya adalah menciptakan konektivitas baik dalam dimensi fisik, kelembagaan, maupun antarmasyarakat.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deksriptif korelatif, yaitu menganalisis hubungan antara kerja sama IMT-GT dengan Konektivitas ASEAN, walaupun tidak menentukan hubungan sebab-akibat. Data dan informasi diperoleh melalui empat cara. *Pertama*, observasi terhadap objek penelitian yang dilakukan melalui penelitian lapangan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia-Thailand (Provinsi NAD, Sumatera Utara, Kuala Lumpur, Penang, Songkhla), termasuk penyusuran koridor konektivitas Selat Malaka dan Koridor Songkhla-Penang-Medan. *Kedua*, wawancara terhadap para narasumber yang mengetahui topik penelitian yang dibahas di lapangan, baik pejabat pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat, dan akademisi dalam negeri maupun luar negeri. *Ketiga*, diskusi terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*) dengan mengundang para narasumber yang dianggap ahli dalam isu yang terkait topik penelitian. Diskusi juga bertujuan untuk menyaring dan mengkonfirmasi

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 70.

<sup>15</sup> Andrew Cottey, "Sub-regional Cooperation in Europe: An Assessment", *Bruges Regional Integration & Global Governance Papers*, Vol. 3, (2009), hlm. 13-15.



data, informasi, dan cara pandang. *Keempat*, studi pustaka terhadap berbagai data sekunder seperti buku, jurnal, laporan hasil penelitian, dokumen perjanjian, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

### Arti Penting Subregional IMT-GT

Dalam konteks subregionalisme di ASEAN, Subregional IMT-GT memiliki karakteristik yang unik, karena mencakup keterhubungan darat antara Malaysia dan Thailand di daratan utama Asia Tenggara, maupun keterhubungan maritim antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Wilayah perbatasan ketiga negara meliputi Selat Malaka yang menjadi selat tersibuk kedua di dunia (setelah Selat Hormuz) dan dinobatkan sebagai barometer kesehatan perdagangan dunia.<sup>16</sup> Oleh karena itu, Selat Malaka menjadi sangat strategis bukan hanya bagi Indonesia, Malaysia, dan Thailand, tetapi juga bagi negara-negara lain pengguna selat tersebut (*user states*).

Kemudian dalam konteks kepentingan Indonesia, negara ini membutuhkan stabilitas di wilayah perbatasannya dengan Malaysia dan Thailand, termasuk di Selat Malaka. Hal ini ditunjukkan dengan cukup ketatnya pengamanan laut perbatasan tersebut, yang kini secara kelembagaan dibebankan kepada Badan Keamanan Laut bekerja sama dengan 13 pemangku kepentingan lain seperti TNI AL, Polairud, Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain.

Selain itu, pada masa pemerintahan saat ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memiliki visi nasional menjadi Poros Maritim Dunia. Sebagai tindak lanjutnya, Kabinet Presiden Joko Widodo menetapkan prioritas pembangunan maritim sebagai kekuatan utama dalam program pembangunan Nawacita. Berkaitan dengan hal tersebut, Selat Malaka sendiri merupakan pintu gerbang perairan Indonesia menuju Samudra Hindia menuju ke Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika. Oleh karena itu, pembangunan di kawasan perbatasan tersebut menjadi vital dalam mewujudkan cita-cita Poros Maritim Dunia.

<sup>16</sup> Marcus Hand, "Malacca Stra its Transits Hit all Time High in 2013, Pass 2008 Peak", diakses pada 8 Februari 2016.

Kemudian dalam konteks kepentingan Malaysia, ada delapan negara bagian yang dilibatkan dalam kerja sama IMT-GT, yaitu Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor. Negara-negara bagian tersebut terletak di Semenanjung Malaysia, yang secara geografis berdekatan dengan Pulau Sumatra Indonesia melalui laut dan dengan wilayah Thailand bagian selatan melalui darat. Berbeda dengan kasus Indonesia dan Thailand yang wilayahnya di subkawasan IMT-GT merupakan "daerah pinggiran", wilayah Malaysia yang dilibatkan justru merupakan daerah yang maju secara ekonomi.

Bagi Malaysia, wilayah tersebut merupakan penopang vital dalam upayanya mewujudkan kebijakan pembangunan ekonomi dalam tahap *National Transformation Policy* (2011-2020) menuju *high income economy*. Kerja sama yang dibangun di IMT-GT dapat menjadi peluang bagi Malaysia untuk memasarkan produknya, meningkatkan kunjungan wisatawan luar, hingga memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang murah. Dengan adanya kerja sama dan pembangunan konektivitas, target-target tersebut akan lebih mudah dicapai.

Adapun dalam konteks kepentingan Thailand, empat belas provinsi di Thailand Selatan yang dilibatkan dalam kerja sama IMT-GT merupakan daerah yang relatif tertinggal bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi di bagian utara. Empat belas provinsi tersebut hanya menyumbang 8,64% dari total PDB Thailand pada tahun 2013.<sup>17</sup> Karena itu, Thailand berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui kerja sama subregional dengan Malaysia dan Indonesia. Selain itu, wilayah di Thailand Selatan tersebut juga diwarnai oleh konflik vertikal antara pemerintah Thailand yang berpusat di Bangkok dengan kelompok-kelompok separatis, terkait dengan isu perbedaan suku, agama, dan ketimpangan ekonomi. Kedekatan identitas antara Thailand Selatan dengan wilayah Malaysia dan Indonesia yang berpenduduk Melayu-Muslim menjadi peluang bagi terjalannya kerja sama yang lebih

<sup>17</sup> National Economic and Social Development Board of Thailand (NESDB), 2013, "Table of Gross Regional and Provincial Product 2013", [http://www.nesdb.go.th/nesdb\\_en/ewt\\_dl\\_link.php?nid=4316](http://www.nesdb.go.th/nesdb_en/ewt_dl_link.php?nid=4316), diakses pada 26 Oktober 2016.

erat yang memperbaiki kondisi di Thailand Selatan, sehingga diharapkan dapat meredam konflik yang selama ini berlangsung.

Secara lebih spesifik dalam isu kemaritiman, posisi Thailand yang bukan merupakan negara kepulauan, tetapi negara pantai, menjadikan sektor maritim bukan menjadi sektor yang utama. Selama ini, sistem keterhubungan di Thailand masih mengandalkan sisi timur yang berhadapan dengan Teluk Thailand. Adapun sisi pantai barat yang berhadapan dengan Laut Andaman dan Selat Malaka cenderung tertinggal.<sup>18</sup> Keterlibatan dalam kerja sama subkawasan IMT-GT dapat menjadi peluang untuk membangun pantai sisi barat tersebut dan mengejar ketertinggalannya dari pantai sisi timur. Adapun pelabuhan utama yang diproyeksikan untuk dikembangkan di sisi barat ini adalah Pelabuhan Ranong yang memiliki akses ke Samudra Hindia. Ke depan, pelabuhan ini dapat menjadi akses bagi Thailand secara khusus maupun IMT-GT dan ASEAN secara umum dalam menjalin kerja sama dengan organisasi IORA di kawasan Samudra Hindia tersebut. Apalagi, wilayah Samudra Hindia kini semakin diperhitungkan karena sekitar 80% jalur pelayaran minyak melalui lautan ini, yang diikuti dengan menggeliatnya kembali IORA sebagai organisasi regional bagi 21 negara pesisir Samudra Hindia.<sup>19</sup>

Kepentingan lain Thailand terhadap kerja sama subkawasan ini adalah perdagangan lintas batas, terutama dengan Malaysia. Selain dapat menjadikan Malaysia sebagai pasar produk-produknya melalui perdagangan lintas batas, Thailand juga dapat menggunakan wilayah ini untuk mendistribusikan produknya dari Thailand Selatan melalui pelabuhan-pelabuhan internasional yang ada di Malaysia guna diekspor ke negara ketiga. Hal ini mengingat jarak yang lebih dekat dibandingkan barang dikirim via Bangkok, sehingga memangkas waktu dan biaya.

<sup>18</sup> Pichet Kunadhamrat, "Thailand's Transport Infrastructure Development Strategy, 2015-2022", <http://tha.mofa.go.kr/webmodule/.../download.jsp>, diakses pada 26 Oktober 2016.

<sup>19</sup> Sergei DeSilva-Ranasinghe, "Why the Indian Ocean Matters", *The Diplomat* 2 Maret 2011, <http://thediplomat.com/2011/03/why-the-indian-ocean-matters/>, diakses pada 7 Agustus 2017.

## Pelaksanaan Kerja Sama IMT-GT 2012-2016

Dalam menjalankan program-program dalam *Implementation Blueprint 2012-2016*, IMT-GT membagi pelaksanaannya menjadi enam kelompok kerja (*working groups*), yaitu *Working Group on Agriculture, Agro-Based Industry & Environment* (WGAAE), *Working Group on Halal Products and Services* (WGHAPAS), *Working Group on Tourism* (WGT), *Working Group on Infrastructure & Transport* (WGIT), *Working Group on Trade & Investment* (WGTI), dan *Working Group on Human Resources & Development* (WGHRD).

*Pertama*, kelompok kerja untuk sektor pertanian. Indonesia melalui Kementerian Pertanian banyak berkepentingan dalam kelompok kerja ini untuk mempromosikan investasi dalam produksi, pengolahan, dan pemasaran produk pertanian, dengan berfokus pada mengurangi atau menghilangkan hambatan investasi. Salah satu andalan Indonesia yang dimasukkan dalam cetak biru bidang ini adalah investasi budidaya ikan tuna di Sumatera Barat. Di samping itu, dikembangkan juga pusat *Networking for Animal Production and Biotechnology* di wilayah Sumatera Barat.<sup>20</sup>

*Kedua*, kelompok kerja untuk sektor produk dan jasa halal. Indonesia pada tahun 2014-2016 mendapat tugas untuk menjadi koordinator untuk kelompok kerja ini. Sejak adanya UU nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kelompok kerja produk dan jasa halal secara resmi berada di bawah kepemimpinan Kementerian Agama, walaupun dalam pelaksanaannya dibantu oleh LPPOM-MUI dan Kementerian Pertanian.<sup>21</sup> Namun pada kenyataannya, LPPOM-MUI yang lebih berperan aktif dibandingkan yang lain. Secara umum ada tiga hal penting yang menjadi kekuatan program mereka yaitu integritas standar produk dan jasa, pengembangan industri, serta *branding* dan promosi. Meskipun kedua

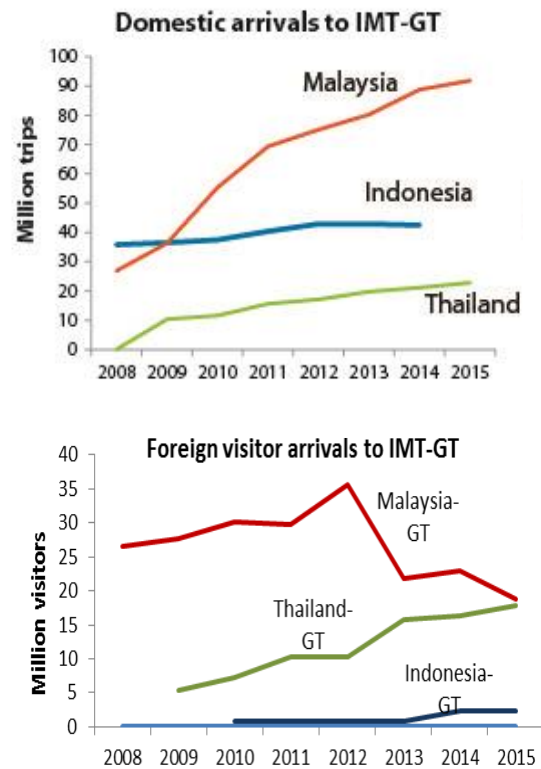
<sup>20</sup> Kementerian Pertanian RI, "Pertemuan IMT-GT WGAAE ke-6", <http://www.pusatkin.setjen.pertanian.go.id/berita-216-pertemuan-imtgt-wgaae-ke6.html>, diakses pada 5 September 2016.

<sup>21</sup> FGD Tim Perbatasan LIPI dengan *Alternate Senior Officer* IMT-GT di Kemenko Ekonomi dan LPPOM-MUI di Widya Graha LIPI pada tanggal 4 Oktober 2016.

negara lainnya juga mempunyai kepentingan untuk mengembangkan industri halal, Indonesia menunjukkan suatu peluang besar untuk meningkatkan nilai perdagangannya. Diperkirakan nilai perdagangan di subregional IMT-GT dapat mencapai sekitar USD 89,1 miliar.<sup>22</sup> Industri halal di sini bukan hanya terkait dengan makanan, tetapi juga produk obat-obatan, kesehatan, kosmetik, bahan kimia, pelayanan logistik, pariwisata, pendidikan, jasa keuangan perbankan, dan asuransi. Meskipun demikian, Indonesia belum memiliki *grand design* dalam pengembangan produk dan jasa halal secara nasional, padahal potensi yang dimiliki sangat tinggi.

*Ketiga*, kelompok kerja sektor pariwisata. Pada tahun 2014-2016 (tiga tahun), Indonesia juga menjadi koordinator untuk kelompok kerja ini. Perkembangan sektor ini terlihat baik dengan pertumbuhan yang cepat dari jumlah turis didalam dan dari luar wilayah IMT-GT, pengoperasian maskapai penerbangan yang lebih banyak, peningkatan frekuensi penerbangan ke wilayah IMT-GT, dan peningkatan jumlah hotel, terutama di Medan, Hat Yai dan Sadao. Dibandingkan dengan tiga kali penerbangan mingguan antara Penang dan Medan pada awal inisiatif IMT-GT dibuat, saat ini telah ada beberapa maskapai yang melakukan beberapa kali penerbangan dalam seminggu. Tidak hanya antara Medan dan Penang, tetapi juga bandara IMT-GT yang lain seperti Pekanbaru, Banda Aceh, dan Palembang. Selain itu, IMT-GT juga mencanangkan kerja sama pembukaan jalur kapal pesiar Phuket-Langkawi-Sabang.

Dalam implementasinya, kunjungan wisatawan domestik IMT-GT ke tiga negara tersebut juga terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dari tiga negara tersebut, Malaysia-lah yang paling banyak didatangi wisatawan domestik, terutama untuk karena program “*medical tourism*” yang banyak diminati warga Indonesia di Pulau Sumatera. Namun untuk kunjungan wisatawan asing, terjadi penurunan yang tajam di Malaysia, sementara di Thailand dan Indonesia tetap mengalami peningkatan. Kondisi di atas dapat terlihat dari grafik di bawah ini.



**Gambar 1.** Grafik Kunjungan Wisatawan di IMT-GT

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2016

*Keempat*, kelompok kerja di sektor transportasi, energi, dan infrastruktur. Seperti yang sudah dijelaskan di pendahuluan, IMT-GT mempunyai program pembangunan lima koridor ekonomi seperti dalam peta di bawah ini.

<sup>22</sup> *Ibid.*



**Gambar 2.** Peta Koridor Ekonomi IMT-GT

Sumber: IMT-GT, *Mid-Term Review of The IMT-GT Roadmap For Development: 2007-2011*,  
(Hua Hin: IMT-GT, 2009).

Dalam kelompok kerja ini, Indonesia diwakili oleh Kementerian Perhubungan. Indonesia membangun Tol Trans-Sumatera yang merupakan bagian dari koridor IMT-GT yang terbagi dalam empat koridor utama dan tiga koridor prioritas jaringan jalan tol. Keempat koridor utama yaitu: Bandar Lampung (Lampung) – Palembang (Sumatera Selatan) 358 km, Palembang – Pekanbaru (Riau) 610 km, Pekanbaru – Medan (Sumatera Utara) 548 km, dan Medan-Banda Aceh (NAD) 460 km. Sedangkan tiga koridor prioritas pembangunan yakni: Palembang – Bengkulu sepanjang 303 km, Pekanbaru – Padang (Sumatera Barat) sepanjang 242 km dan Medan – Sibolga sepanjang 175 km.

Kemudian untuk konektivitas maritim Indonesia-Malaysia, di masa lalu sudah ada konektivitas laut antara Medan dengan Penang, melalui kapal feri Ro-Ro (*rol on-rol off*).<sup>23</sup> Namun demikian, saat ini mobilitas melalui laut ini ditiadakan dengan alasan bahwa jalur penyeberangan feri ini kurang diminati oleh penumpang. Mereka lebih memilih jalur udara yang lebih cepat dan harganya juga tidak terlalu mahal. Sebagai ganti penyeberangan Penang-Medan itu, telah dioperasikan penyeberangan kapal dari Penang – Langsa (Aceh) yang berjadwal hari Selasa dan Kamis.<sup>24</sup> Selain itu, ada feri dari pelabuhan Dumai ke Port of Dickson, Malaka yang berlangsung 4 kali dalam seminggu.<sup>25</sup>

Untuk koridor Indonesia-Thailand via laut, koridor kelima merencanakan untuk menghubungkan provinsi Ranong, melalui provinsi Phang Nga, dan provinsi Phuket dengan Banda Aceh, Indonesia. Untuk pembangunan konektivitas maritim di Selat Malaka, Thailand

mendesak realisasi koridor tersebut dalam sidang SOM IMT-GT tahun 2014 di Banda Aceh. Hal ini penting bagi Thailand untuk memperkuat pelabuhan Ranong dalam aksesnya ke Samudera Hindia.<sup>26</sup> Sayangnya, pemerintah Provinsi Aceh sepertinya masih memiliki kendala untuk berkomitmen secara lebih dalam dan lebih mengandalkan komitmen dari pemerintah pusat di Jakarta. Keterbatasan sumber daya disinyalir menjadi faktor penyebabnya. Hal ini masih menjadi kendala umum bagi pelaksanaan program-program di IMT-GT, bukan hanya di Provinsi Aceh, tapi juga provinsi-provinsi lainnya.

Untuk koridor Malaysia-Thailand via darat, sektor Thailand pada koridor ini dimulai dari provinsi Surathani hingga provinsi Narathiwat. Sedangkan sektor Malaysia dimulai dari negara bagian Kedah hingga negara bagian Penang/Pulau Penang. Sektor Thailand dan sektor Malaysia ini tersambung dengan sektor Thailand lainnya yang dimulai dari provinsi Songkhla menuju Kedah melalui daerah perbatasan di kota Sadau dan Bukit Kayu Hitam. Sementara itu, sektor Thailand pada koridor kedua dimulai provinsi Trang hingga provinsi Satun. Sedangkan sektor Malaysia dimulai dari negara bagian Perlis hingga Malaka. Kepentingan Thailand dalam koridor ini adalah mendorong mobilisasi orang dan barang secara lebih mudah, mengingat adanya persamaan antara penduduk empat provinsi di Thailand Selatan dengan penduduk Malaysia, yaitu sesama masyarakat Melayu Muslim.

*Kelima*, sektor perdagangan dan investasi. Indonesia diwakili oleh Kementerian Perdagangan dan BKPM, yang didukung *sub working Group* yaitu BPS. Kemajuan di bidang perdagangan dan investasi sebenarnya meningkat secara signifikan. Mengingat total perdagangan IMT-GT mencapai 491 miliar dolar, atau sekitar 25% dari perdagangan total ASEAN.<sup>27</sup> Sedangkan jauh lebih banyak investasi sektor

<sup>23</sup> “Kapal Ro-Ro Medan-Penang Beroperasi kembali”, <http://www.bumn.go.id/pelindo1/en/berita/661/KAPAL.RO-RO.MEDAN.PENANG.BEROPERASI.KEMBALI#>, diakses pada 20 September 2016.

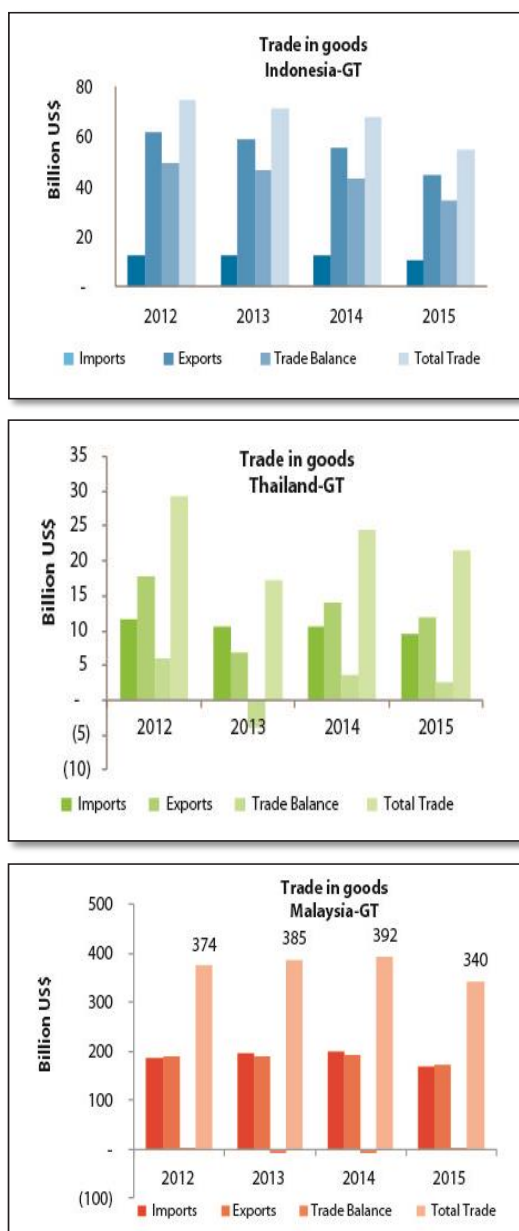
<sup>24</sup> Informasi dari Pelabuhan Belawan ketika tim peneliti melakukan observasi ke pelabuhan ini pada Mei 2016. Informasi yang sama juga bisa diperoleh dari “Ferry from Penang to Medan”, <https://www.lonelyplanet.com/thorntree/forums/asia-south-east-asia-islands-peninsula/indonesia/ferry-from-penang-to-medan?page=1>, diakses pada 06 Oktober 2016.

<sup>25</sup> IMT-GT, *IMT-GT Implementation Blueprint 2012-2016*, *op.cit.*

<sup>26</sup> “About Ranong Port”, <http://www.rnp.port.co.th/eng/dataset1/data1.html>, diakses pada 27 Juni 2016.

<sup>27</sup> “BIMP-EAGA dan IMT-GT Regions: Trade, Investment, and Foreign Tourists Increase Significantly”, *Press Release*, Kementerian Perdagangan RI di Langkawi tanggal 28 April 2015.

swasta Malaysia yang menanamkan investasi di bidang pertanian komersial di Sumatera, terutama bidang pertanian komersial seperti kelapa sawit dan pisang. Investasi juga telah dilakukan dalam mengembangkan dan memperluas fasilitas-fasilitas pariwisata terutama resort dan hotel bintang tiga di wilayah IMT-GT. Secara lebih detail, perkembangan sektor perdagangan IMT-GT dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



**Gambar 3.** Diagram Perdagangan di IMT-GT

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2016

Dari grafik di atas, terlihat bahwa tren perdagangan provinsi/negara bagian di masing-masing negara yang terlibat dalam IMT-GT terlihat mengalami penurunan. Kondisi ini, berdasarkan informasi dari Sekretariat Nasional Indonesia untuk IMT-GT, lebih disebabkan oleh faktor eksternal berupa menurunnya perekonomian dunia. Walaupun demikian, kontribusi IMT-GT terhadap perekonomian masing-masing negara masih cukup signifikan. Pada tahun 2014, kontribusi IMT-GT terhadap Produk Domestik Bruto Malaysia sebesar 45,97%, diikuti oleh Indonesia dengan 23,46%, dan Thailand dengan 8,53%.<sup>28</sup>

*Keenam*, sektor pengembangan sumber daya manusia. Dalam kelompok kerja, ini, Indonesia melibatkan Kementerian Tenaga Kerja untuk berkolaborasi pada tindakan yang terkait dengan pengembangan daya saing tenaga kerja serta perbaikan dalam mobilitas tenaga kerja. Namun demikian, data mengenai perkembangan kelompok kerja ini masih terbatas.

Dari penjelasan di atas, sepiintas terlihat bahwa pelaksanaan kerja sama IMT-GT melalui keenam kelompok kerjanya telah banyak membuahkan hasil. Namun demikian, jika dievaluasi secara menyeluruh dari apa yang direncanakan dengan apa yang dilaksanakan, maka hasilnya terlihat sedikit berbeda.

**Tabel 1.** Status Implementasi Proyek dalam Cetak Biru Implementasi IMT-GT 2012-2016

Kelompok Kerja	Proyek			
	Jumlah	Selesai	Sedang Berjalan	Konsep
Pertanian, Agroindustri, dan Lingkungan	16	6	9	1
Produk dan Jasa Halal	10	2	6	2
Pariwisata	15	3	11	1
Infrastruktur dan Transportasi	27	1	24	2
Perdagangan dan Investasi	9	1	6	2
Pembangunan SDM	13	4	4	5
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>17</b>	<b>60</b>	<b>13</b>
Persentase		18,9%	66,6%	14,4%

Sumber: Netty Muharni, “Kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT) dalam Mendukung Keterhubungan Maritim”, disampaikan dalam FGD di Pusat Penelitian Politik – LIPI, Jakarta, 7 April 2016.

<sup>28</sup> Data diolah kembali dari Sekretariat Nasional Indonesia untuk IMT-GT pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2016.

Dari data di atas, terlihat bahwa sampai tahun terakhir 2016, baru 18,9%-nya yang sudah selesai, sementara sebagian besar (66,6%) masih dalam tahap pengerjaan. Adapun 14,4% sisanya masih dalam bentuk konsep, sehingga hampir mustahil dapat diselesaikan sampai akhir tahun 2016. Hal yang menjadi perhatian adalah, terlalu banyaknya program yang direncanakan, sehingga tingkat keterselesaiannya juga cenderung tidak optimal. Di masa depan, IMT-GT diharapkan dapat menetapkan program secara lebih terukur dan berdasarkan skala prioritas, sehingga efektivitas pelaksanaannya dapat ditingkatkan.

### **Peran Kerja Sama Subregional IMT-GT Dalam Mendukung Konektivitas ASEAN**

Seperti yang sudah dijelaskan di kerangka konseptual, konektivitas dalam konteks *Master Plan on ASEAN Connectivity 2011* terdiri atas tiga dimensi, yaitu konektivitas fisik, kelembagaan, dan antarmasyarakat.

#### ***a. Konektivitas Fisik***

IMT-GT berperan dalam mendukung penguatan infrastruktur transportasi dan energi di kawasan. Beberapa program pembangunan transportasi jalan yang dicanangkan di dalam IMT-GT secara langsung bersinergi dengan rencana pembangunan *ASEAN Highway Network* (AHN) yang menjadi program unggulan dalam pembangunan konektivitas darat ASEAN. Selain itu, program pembangunan lima koridor ekonomi prioritas dalam IMT-GT juga turut mendukung upaya untuk menciptakan ASEAN yang lebih terintegrasi secara fisik, baik dari segi daratan maupun konektivitas melalui jalur laut. Kelima koridor tersebut adalah koridor Songkhla-Penang-Medan, koridor Selat Malaka, koridor ekonomi Banda Aceh-Medan-Pekanbaru-Palembang, koridor ekonomi Malaka-Dumai, serta koridor ekonomi Ranong-Phuket-Aceh.

Panjang jalan yang ada di kawasan Indonesia termasuk dalam proyek AH150 sepanjang 1.762,3 km dan AH151 sepanjang 611,9 km yang melintasi Pekanbaru – Bukittinggi - Pematang Siantar – Jambi - Sarolangun; Bengkulu - Lubuk Linggau - Lahat. Mayoritas dari dua segmen yang ada di Indonesia tersebut

juga merupakan program pembangunan yang ada dalam *IMT-GT Implementation Blueprint 2012-2016* dan termasuk proyek penting dalam pembangunan Koridor Ekonomi 3 IMT-GT.<sup>29</sup> Selain dua segmen tersebut, segmen lain yang juga termasuk dalam koridor ekonomi IMT-GT di Indonesia adalah jalur AH25 sepanjang 141,55 km yang melintasi Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bakauheni, dan Merak. Secara umum, kualitas jalan yang ada di lintas Sumatera terbilang lebih rendah dan kurang berkembang apabila dibandingkan dengan kualitas jalan darat yang menghubungkan Malaysia dan Thailand. Tantangan ini perlu menjadi perhatian bagi IMT-GT untuk mengembangkan lebih lanjut konektivitas darat di kawasan yang tercakup dalam kerja samanya dalam rangka mendukung konektivitas yang dirancang oleh ASEAN.

Selain jalur darat lintas Sumatera yang disebutkan di atas, Koridor Ekonomi 1 IMT-GT yang melintasi Bukit Kayu Hitam dan Rantau Panjang di Malaysia juga termasuk dalam skema AHN. Adanya sinergi rancangan program pembangunan koridor ekonomi IMT-GT dengan program AHN yang dikembangkan ASEAN, menunjukkan bahwa pembangunan koridor-koridor ekonomi yang sudah dilakukan oleh IMT-GT memiliki peran penting bagi integrasi ASEAN. Dengan demikian koridor-koridor ekonomi IMT-GT menjadi lebih mampu menerjemahkan target-target yang ingin dicapai oleh ASEAN dalam konteks area yang lebih fokus dan spesifik. Bahkan, program IMT-GT *Hat Yai – Sadao Intercity Motorway* juga membuka pintu bagi ASEAN untuk terhubung dengan negara di luar kawasan, karena direncanakan akan menjadi bagian dari ASEAN Highway yang melintasi Muse, perbatasan Myanmar dengan Tiongkok.

Sayangnya, pencapaian yang diperoleh IMT-GT dalam mendukung pembangunan konektivitas darat di ASEAN sebagaimana yang dijelaskan di atas belum diimbangi dengan pencapaian konektivitas dalam bidang maritim. Fokus pengembangan konektivitas maritim internal dan eksternal di kawasan IMT-GT belum memperlihatkan hasil maksimal

<sup>29</sup> IMT-GT, *IMT-GT Implementation Blueprint 2012-2016*, hlm. 16.

sebagaimana yang ditunjukkan oleh koridor ekonomi yang dibangun di daratan. Kerja sama transportasi di bidang maritim dalam IMT-GT utamanya fokus pada pembangunan infrastruktur pelabuhan. Hal ini sebenarnya sudah sejalan dengan program ASEAN, di mana tujuh dari 47 pelabuhan untuk jaringan transportasi maritim ASEAN berada di area kerja sama IMT-GT, yaitu Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Palembang, dan Pelabuhan Panjang yang berada di Indonesia; Pelabuhan Port Klang dan pelabuhan Penang yang terletak di Malaysia; serta Pelabuhan Songkhla yang terletak di Thailand. Akan tetapi, belum terlihat adanya strategi pengembangan pelabuhan yang jelas di bawah kerangka kerja sama IMT-GT yang tertuang dalam cetak biru pelaksanaan program-programnya. Demikian pula program kapal Roll-on-Roll-off (RoRo) Dumai-Malaka yang seharusnya selesai pada tahun 2015<sup>30</sup>, sampai tahun 2016 masih dalam tahap pembahasan untuk diundur sampai tahun 2018.<sup>31</sup>

### **b. Konektivitas Kelembagaan**

Untuk menunjang kelancaran pembangunan infrastruktur fisik di kawasan Asia Tenggara, diperlukan perangkat kelembagaan yang kuat dan memiliki kapasitas serta dilengkapi dengan perangkat hukum dan kebijakan yang pasti. Peran IMT-GT dalam mendukung konektivitas kelembagaan ASEAN ditunjukkan oleh komitmen IMT-GT untuk mengembangkan program *Special Border Economic Zones* (SBEZ) di wilayah perbatasan Thailand bagian selatan dengan Malaysia bagian utara, serta pengembangan layanan *Custom, immigration, and quarantine* (CIQ) di koridor-koridor ekonomi yang ada di wilayah perbatasan Thailand, Malaysia, dan Indonesia.<sup>32</sup> Dua program ini dilakukan untuk

memudahkan arus barang, jasa, dan orang di wilayah perbatasan.

Namun demikian, pelaksanaan program di atas masih menghadapi banyak kendala. Terkait dengan Pembangunan SBEZ, sampai saat ini masih dalam tahapan konsep.<sup>33</sup> Terkait dengan CIQ, masih banyak wilayah perbatasan yang belum menerapkan sistem layanan CIQ terpadu satu pintu, kecuali di beberapa tempat seperti Pelabuhan Sabang.<sup>34</sup> Demikian pula untuk di perbatasan Thailand dan Malaysia, sistem CIQ diterapkan di perbatasan Sadao-Bukit Kayu Hitam. Terkait dengan hal ini, IMT-GT masih tertinggal bila dibandingkan dengan apa yang sudah diterapkan dalam kerja sama subregional *Greater Mekong Subregion* (GMS) yang menerapkan *Cross Border Transportation Agreement* (CBTA) berupa pos pemeriksaan CIQ bersama bagi barang, jasa, dan orang yang melintasi pos perbatasan tersebut.

Ada beberapa kendala yang menghambat pembangunan konektivitas kelembagaan ini. *Pertama*, perbedaan regulasi domestik masing-masing negara anggota. Perlu ada harmonisasi kebijakan, prosedur, dan standar teknis yang jelas, serta lingkungan sosial dan keamanan yang kondusif. *Kedua*, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perlu ada *political willingness* dari pemerintah pusat dan daerah yang terlibat dalam kerja sama lintas batas ini.<sup>35</sup> *Ketiga*, *Centre for IMT-GT Subregional Cooperation* (CIMIT) sebagai sekretariat IMT-GT kurang didukung dengan sumber daya (manusia dan finansial) yang mencukupi, serta kurang memiliki koordinasi dengan Sekretariat ASEAN. Padahal, program-program dalam IMT-GT diproyeksikan sebagai “*test bed and building bloc*” bagi ASEAN.<sup>36</sup>

<sup>30</sup> CIMIT Newsletter, Desember 2014, hlm. 2, <http://www.imtgt.org/images/CIMIT%20NEWSLETTER%20-%20December%202014.pdf>, diakses pada 14 Oktober 2016.

<sup>31</sup> Paparan narasumber FGD Tim Perbatasan P2P LIPI dengan Sekretariat Nasional IMT-GT, Asdep Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional, Kementerian Koordinator Ekonomi RI, pada 7 April 2016.

<sup>32</sup> IMT-GT, *IMT-GT Implementation Blueprint 2012-2016*, hlm. 12.

<sup>33</sup> Wawancara Tim Perbatasan P2P LIPI dengan Deputy Director I dan Principal Assistant Director pada Regional Development Section, Economic Planning Unit selaku Malaysia's National Secretariat for IMT-GT pada Senin, 16 Mei 2016.

<sup>34</sup> Wawancara Tim Perbatasan P2P LIPI dengan Deputi Komersial dan Investasi dan Head of Port Management Unit, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang pada Rabu, 11 Mei 2016

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> IMT-GT, *Joint Statement The 6th Summit of Indonesia-Malaysia-Thailand Growth-Triangle (IMT-GT)*, Phnom Penh, Cambodia, 4 April 2012.



### **c. Konektivitas Antarmasyarakat**

IMT-GT ikut berperan dalam memperkuat hubungan antarmasyarakat dengan adanya *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle University Network* (IMT-GT UNINET).<sup>37</sup> Sampai saat ini sudah ada 13 universitas di Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang tergabung dalam IMT-GT UNINET, yaitu Universitas Syiah Kuala, Universitas Malikussaleh, Universitas Sumatera Utara, Universitas Riau, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Universitas Sriwijaya, Universitas Andalas, Universitas Lampung, Universiti Sains Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti pendidikan Sultan Idris (UPSI), Prince of Songkla University, dan Thaksin University.

Selain itu, konektivitas antarmasyarakat juga nampak dalam perkembangan sektor pariwisata di intra IMT-GT. *Medical tourism* yang menjadi salah satu paket strategis yang dikembangkan oleh Malaysia dan Thailand. Paket ini menyediakan hotel, akomodasi, tempat makan, bahkan asuransi keuangan dan kesehatan.<sup>38</sup> Sementara itu, Aceh banyak menarik turis dari Malaysia dengan program wisata halalnya.

### **Penutup**

Indonesia, Malaysia, dan Thailand telah mengembangkan kerja sama perbatasan di dalam wadah subregionalisme IMT-GT. Kehadiran kerja sama subregional/subregional tersebut menjadi peluang yang baik dalam mendorong pembangunan konektivitas/konektivitas. Apalagi, karakter subregional tiga negara tersebut unik, karena mencakup konektivitas darat antara Malaysia dan Thailand di daratan utama Asia Tenggara, maupun konektivitas maritim antara Indonesia dengan Malaysia dan Thailand. Pembangunan konektivitas tersebut menjadi elemen pendukung yang penting dalam mewujudkan Komunitas ASEAN.

Terkait dengan arti penting subregional IMT-GT, bagi Indonesia subregional tersebut adalah kawasan strategis yang penting untuk

dijaga stabilitasnya, mengingat wilayahnya mencakup wilayah perairan Selat Malaka, sehingga dilakukan pengamanan yang ketat di bawah koordinasi Bakamla. Selain itu, kawasan tersebut juga berperan penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yaitu sebagai pintu gerbang perairan Indonesia menuju Samudra Hindia menuju ke Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika. Kemudian dalam konteks kepentingan Malaysia, wilayahnya di subregional tersebut merupakan penopang vital dalam upayanya mewujudkan kebijakan pembangunan ekonomi dalam tahap *National Transformation Policy* (2011-2020) menuju *a high income economy*. Adapun bagi Thailand, pemerintah pusatnya berkepentingan agar wilayah Thailand Selatan yang pembangunannya tertinggal dan menjadi daerah konflik dapat ditingkatkan kesejahteraannya melalui kerja sama IMT-GT.

Sementara untuk pelaksanaan kerja sama perbatasan di subregional tersebut, IMT-GT membagi bidang kerja samanya ke dalam enam kelompok kerja (*working groups*), yaitu *Working Group Agriculture, Agro-Based Industry & Environment* (WGAAE), *Working Group Halal Products and Services* (WGHPAS), *Working Group Tourism* (WGT), *Working Group Infrastructure & Transport* (WGIT), *Working Group Trade & Investment* (WGTI), dan *Working Group Human Resources & Development* (WGHRD). Masing-masing kelompok kerja tersebut memiliki rencana proyek-proyek yang akan diimplementasikan dalam periode 2012-2016. Sampai berjalannya 2016, dari 90 proyek yang direncanakan, baru 18,9%-nya yang sudah selesai, sementara sebagian besar (66,6%) masih dalam tahap pengerjaan. Terlalu banyaknya program yang direncanakan membuat penyelesaiannya menjadi cenderung tidak optimal. Dalam hal ini, Indonesia dianggap belum cukup mampu memanfaatkan kerja sama subregional tersebut dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, terutama karena perencanaan yang kurang fokus dan kurang matang atas proyek-proyek yang akan digarap. Hampir sama dengan Indonesia, Thailand juga belum optimal dalam memanfaatkan kerja sama ini. Hal ini terkait dengan kurang diprioritaskannya

<sup>37</sup> IMT-GT, *Building A Dynamic Future: A Roadmap for Development 2007-2011*, (Cebu: IMT-GT, 2007), hlm. 6.

<sup>38</sup> IMT-GT, *IMT-GT Implementation Blueprint 2012-2016*, hlm. 21.

IMT-GT dibanding GMS. Negara yang dinilai sudah cukup mampu memanfaatkan IMT-GT adalah Malaysia, mengingat posisinya yang ada di tengah Indonesia dan Thailand, serta modal infrastrukturnya yang sudah baik.

Terkait dengan peran IMT-GT dalam Pembangunan Konektivitas ASEAN, dalam dimensi konektivitas fisik IMT-GT telah menetapkan proyek pembangunan lima koridor ekonomi/konektivitas. Koridor ini disinergikan dalam program *ASEAN High Way* di dalam *Master Plan on ASEAN Connectivity*. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan koridor-koridor ekonomi IMT-GT memiliki peran penting bagi konektivitas ASEAN. Sayangnya, pembangunan konektivitas tersebut masih lebih berat kepada dimensi darat. Sementara pembangunan konektivitas maritim belum terlalu nampak terlihat implementasinya, walaupun sudah direncanakan. Kemudian dalam dimensi konektivitas kelembagaan, peran IMT-GT ditunjukkan dengan rencana pengembangan program *Special Border Economic Zones* (SBEZ) di wilayah perbatasan Thailand bagian selatan dengan Malaysia bagian utara, serta pengembangan layanan *Custom, immigration, and quarantine* (CIQ) di koridor-koridor ekonomi yang ada di wilayah perbatasan Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Sayangnya, pembangunan SBEZ tersebut masih dalam tahapan konseptual saja. Namun demikian, IMT-GT sudah mempunyai modal berupa forum bisnis JBC dan sekretariat bernama CIMT, walaupun koordinasinya dengan Sekretariat ASEAN masih lemah. Adapun dalam dimensi konektivitas antarmasyarakat, IMT-GT juga ikut berperan melalui pembentukan IMT-GT UNINET dan ramainya pariwisata antartiga negara tersebut.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan kerja sama IMT-GT telah berperan positif dalam membangun konektivitas intra ASEAN, bahkan berpotensi membangun konektivitas antara tiga negara IMT dengan kawasan lain. Namun demikian, secara umum konektivitas di tingkat subregional masih lebih dominan di darat dan udara. Sementara itu, konektivitas di laut masih belum semaju dua mata lainnya. Untuk menciptakan konektivitas

yang baik, ketiga mata ini perlu dikembangkan secara paralel dan saling mendukung.

## Daftar Pustaka

### Buku

Asian Development Bank dan Commonwealth Secretariat. 2005. *Toward a New Pacific Regionalism*. Mandaluyong City, Philippines: ADB.

### Jurnal

Cottey, Andrew. 2009. "Sub-regional Cooperation in Europe: An Assessment". *Bruges Regional Integration & Global Governance Papers*. Vol. 3.

Gochhayat, Artatrana. 2014. "Regionalism and Sub-regionalism: A Theoretical Framework with Special Reference to India". *African Journal of Political Science and International Relations* Vol. 8. 1. Februari.

### Dokumen

ASEAN. 2011. *Master Plan on ASEAN Connectivity*. Ha Noi: ASEAN.

IMT-GT. 2012. *IMT-GT Implementation Blueprint 2012-2016*. Phnom Penh: IMT-GT.

IMT-GT. 2009. *Mid-Term Review of The IMT-GT Roadmap For Development: 2007-2011*. Hua Hin: IMT-GT.

IMT-GT. 2007. *Building A Dynamic Future: A Roadmap for Development 2007-2011*. Cebu: IMT-GT.

IMT-GT. 2012. *Joint Statement The 6th Summit of Indonesia-Malaysia-Thailand Growth-Triangle (IMT-GT)*. Phnom Penh, Cambodia: IMT-GT.

### Policy Paper

Tim Perbatasan Pusat Penelitian Politik LIPI. 2016. "Kerja Sama Subregional sebagai Media Pendukung Konektivitas ASEAN", *Policy Paper*. Jakarta: P2Politik LIPI.

### Surat Kabar dan Internet

"About Ranong Port", dalam <http://www.rnp.port.co.th/eng/dataset1/data1.html>, diakses pada 27 Juni 2016.

DeSilva-Ranasinghe, Sergei, "Why the Indian Ocean Matters", *The Diplomat* 2 Maret 2011, dalam <http://thediplomat.com/2011/03/why-the-in->

- dian-ocean-matters/, diakses pada 7 Agustus 2017.
- “Ferry from Penang to Medan”, dalam <https://www.lonelyplanet.com/thorntree/forums/asia-south-east-asia-islands-peninsula/indonesia/ferry-from-penang-to-medan?page=1> diakses pada 6 Oktober 2016.
- CIMT Newsletter*, dalam <http://www.imtgt.org/images/CIMT%20NEWSLETTER%20-%20December%202014.pdf> Desember 2014, diakses pada 14 Oktober 2016.
- Hand, Marcus, “Malacca Straits transits hit all time high in 2013, pass 2008 peak”, 10 Februari 2014, dalam <http://www.seatrade-maritime.com/news/asia/malacca-straits-transits-hit-all-time-high-in-2013-pass-2008-peak.html>, diakses pada 8 Februari 2016.
- IMT-GT, “About IMT-GT”, dalam <http://www.imtgt.org/About.htm>, diakses pada 5 Februari 2016.
- Indian Ocean Rim Association, “IORA Membership”, dalam <http://www.iora.net/about-us/membership.aspx>, diakses pada 8 Februari 2016.
- Kementerian Pertanian RI, “pertemuan IMT-GT WGAAE ke-6”, dalam <http://www.pusatkin.setjen.pertanian.go.id/berita-216-pertemuan-imtgt-wgaae-ke6.html>, diakses pada 5 September 2016.
- Kunadhamrat, Pichet. “Thailand’s Transport Infrastructure Development Strategy, 2015-2022”, dalam <http://tha.mofa.go.kr/webmodule/.../download.jsp>, diakses pada 26 Oktober 2016.
- “Kapal Ro-Ro Medan-Penang Beroperasi kembali”, dalam <http://www.bumn.go.id/pelindo1/en/berita/661/KAPAL.RO-RO.MEDAN-PENANG.BEROPERASI.KEMBALI#>, diakses pada 20 September 2016.
- National Economic and Social Development Board of Thailand (NESDB), “Table of Gross Regional and Provincial Product 2013”, dalam [http://www.nesdb.go.th/nesdb\\_en/ewt\\_dl\\_link.php?nid=4316](http://www.nesdb.go.th/nesdb_en/ewt_dl_link.php?nid=4316), diakses pada 26 Oktober 2016.

## Wawancara dan FGD

- FGD Tim Perbatasan LIPI dengan *Alternate Senior Officer* IMT-GT di Kemenko Ekonomi dan LPPOM-MUI di Widya Graha LIPI pada tanggal 4 Oktober 2016.
- FGD Tim Perbatasan P2P LIPI dengan Sekretariat Nasional IMT-GT, Asdep Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional, Kementerian Koordinator Ekonomi RI, pada 7 April 2016.
- Wawancara Tim Perbatasan P2P LIPI dengan Deputy Director I dan Principal Assistant Director pada Regional Development Section, Economic Planning Unit selaku Malaysia’s National Secretariat for IMT-GT pada Senin, 16 Mei 2016.
- Wawancara Tim Perbatasan P2P LIPI dengan Deputi Komersial dan Investasi dan Head of Port Management Unit, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang pada Rabu, 11 Mei 2016.

## Lain-lain

- “BIMP-EAGA dan IMT-GT Regions: Trade, Investment, and Foreign Tourists Increase Significantly.” *Press Release*. Kementerian Perdagangan RI di Langkawi tanggal 28 April 2015.

## TENTANG PENULIS

### **Aisah Putri Budiatri**

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal, buku dan dipresentasikan di dalam konferensi nasional dan internasional. Beberapa judul artikel yang telah diterbitkan diantaranya berjudul: “Pengawasan DPR RI 1999-2004: Mewakili Partai, Mengabaikan Rakyat?”, “Representasi Perempuan dalam Pusaran Politik Papua,” “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD),” dan beberapa artikel lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui [aisahputrib@gmail.com](mailto:aisahputrib@gmail.com).

### **Wasisto Raharjo Jati**

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2012, ia menamatkan kuliah (S-1) di Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah nasional dan Aktif menulis kolom opini juga di berbagai macam media massa, baik lokal maupun nasional. Ia menekuni studi tentang Politik Kelas, Kelas Menengah, Ekonomi-Politik, dan Gerakan Politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: [wasisto.raharjo.jati@gmail.com](mailto:wasisto.raharjo.jati@gmail.com)

### **Dina Fadiyah**

Penulis adalah staf pengajar di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Telah menyelesaikan S2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada. Email: [dinafadiyah@hotmail.com](mailto:dinafadiyah@hotmail.com)

### **Septi Satriani**

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Lokal, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia memperoleh Gelar Sarjana dari Ilmu Politik Universitas Gajah Mada pada tahun 1999 dan Gelar Master dari Ilmu Antropoloti Universitas Gajah Mada pada tahun 2015. Ia menekuni studi politik lokal, politik sumber daya alam, dan studi konflik. Penulis dapat dihubungi melalui: [septisatriani@gmail.com](mailto:septisatriani@gmail.com).

### **Siswanto**

Penulis kelahiran Jakarta ini menamatkan S1 pada Fakultas Sospol jurusan Hubungan Internasional Universitas Jayabaya Jakarta pada tahun 1986. Selanjutnya mengikuti Program Magister pada Program Studi Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, dan lulus tahun 1997. Gelar doctor diraih pada Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia, pada tahun 2008. Sejak 1999 menjadi peneliti P2P-LIPI untuk menjabat Kepala Bidang Perkembangan Eropa. Sebagian besar karya ilmiah dan tulisannya membahas tentang kebijakan luar negeri AS dan hubungan Indonesia-AS. Sejak tahun 2008 sampai sekarang menjadi dosen tamu pada Program Studi Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui [sish\\_jakarta@yahoo.com](mailto:sish_jakarta@yahoo.com).

### **Sandy Nur Ikfal Raharjo**

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Internasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. S1 ilmu Hubungan Internasional diselesaikan di FISIP Universitas Indonesia. Gelar S2 diperoleh dari Universitas Pertahanan dengan tema Resolusi Konflik. Ia menekuni studi-studi pembangunan wilayah perbatasan, sengketa dan konflik perbatasan, serta isu-isu stabilitas keamanan regional. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: [sandy.raharjo@gmail.com](mailto:sandy.raharjo@gmail.com).

### **Anggi Afriansyah**

Lahir di Bekasi, 17 April 1987. Setelah menyelesaikan studi sarjana di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta (2010), ia kemudian melanjutkan studi di Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia (2014). Pernah menjadi guru di SMAI Al Izhari, Pengajar di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Terbuka, Akademi Kebidanan Prima Indonesia, dan STKIP Kusuma Negara, juga pernah menjadi staf di Unit Implementasi Kurikulum (UIK) Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (2015). Saat ini merupakan Peneliti Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Anggi Afriansyah memiliki fokus kajian sosiologi pendidikan. Aktif menulis di media cetak maupun *online*. Beberapa tulisannya sudah dimuat di Koran Berita Cianjur, Jawa Pos, Koran Jakarta, Media Indonesia, Harian Republika, Lampung *Post*, Radar Bangka, Radar Tasikmalaya, Padang Ekspres, NU Online, dan [gusdurian.net](http://gusdurian.net). Dapat dihubungi melalui [afriansyah.anggi@gmail.com](mailto:afriansyah.anggi@gmail.com).

## PEDOMAN PENULISAN

1. Tulisan yang dimuat harus merupakan kajian ilmiah atas isu dan peristiwa yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan internasional, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
2. Tulisan merupakan karya sendiri, bukan saduran atau terjemahan dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk dan bahasa apa pun.
3. Tulisan mengandung data atau pemikiran yang baru dan orisinal.
4. Tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan.
5. Panjang naskah untuk artikel, 20-25 halaman A4, spasi 1,5; *book review*, 10-15 halaman A4, spasi 1,5.
6. Sistematika artikel hasil pemikiran/telaahan adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

### JUDUL

#### Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

*Abstract: Abstract in English (max. 150 words)*

*Keywords: 4 – 5 words/ phrase*

**Abstrak:** Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

**Kata Kunci:** 4 – 5 kata/ frasa

#### Pendahuluan

#### Pembahasan

#### Penutup

#### Daftar Pustaka

7. Sistematika artikel review buku (*book review*) adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; judul buku; pengarang; penerbit; cetakan; tebal; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

## **JUDUL**

### **Penulis**

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Judul buku

Pengarang

Penerbit

Tebal

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/ phrase

**Abstrak:** Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

**Kata Kunci:** 4 – 5 kata/ frasa

### **Pendahuluan**

### **Pembahasan**

### **Penutup**

### **Daftar Pustaka**

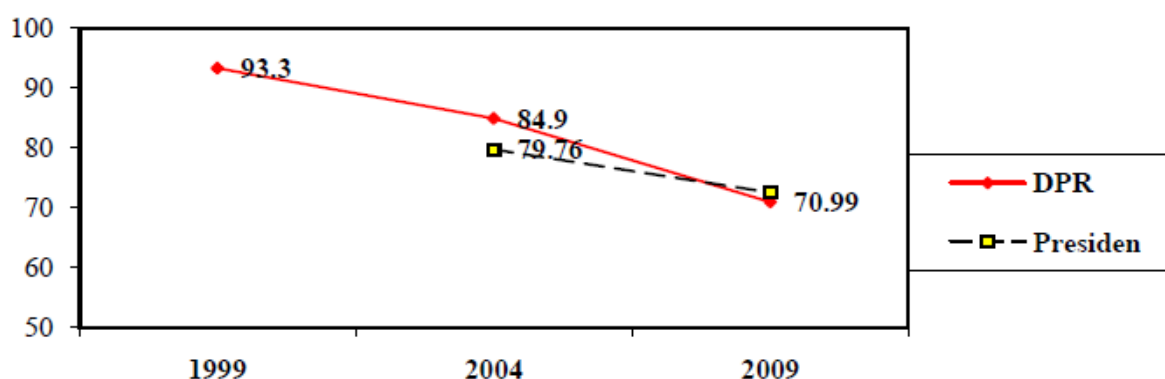
8. Tabel dan gambar, untuk tabel dan gambar (grafik) di dalam naskah harus diberi nomor urut.
  - a. Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
  - b. Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
  - c. Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis paling bawah tabel. Sedangkan untuk garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.

Contoh penyajian Tabel:

**Tabel 1.** Agenda-agenda Besar Konsolidasi

Domain	Vertikal	Horizontal
Internal	Pemantapan kepengurusan partai hingga level terendah Sosialisasi agenda politik	Pemantapan soliditas elite partai pada level DPP Pemantapan agenda politik menyambut pemilu
Eksternal	Pembangunan, pemeliharaan dan pemantapan dukungan masyarakat	Penjajagan koalisi dengan partai-partai lain dan kalangan institusi-institusi nonpolitik

Contoh penyajian Gambar/Grafik:



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

**Grafik 2.** Tren Partisipasi dalam Pemilu

9. Perujukan sumber acuan menggunakan *footnotes*, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **Format rujukan dari buku:** nama penulis, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, nomor halaman, titik. Contoh:  
Denny J.A., *Partai Politik Pun Berguguran*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. v.
  - b. **Format rujukan dari buku (bunga rampai):** nama penulis artikel, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik”, dalam, nama editor buku, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, h., nomor halaman, titik. Contoh:  
Leonardo Morlino, “Political Parties and Democratic Consolidation in Southern Europe,” dalam Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros dan Hans Jurgen Puhle (eds.), *The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective*, (Baltimore MD: Johns Hopkins University Press, 1995), h. 315–388.
  - c. **Format rujukan dari jurnal:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber artikel (*italic*), nomor atau edisi, tahun, h., nomor halaman, titik. Contoh:  
Lili Romli, “Peta Kekuatan Politik Setelah Reformasi dan Kecenderungan Koalisi Parpol,” *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 2000, h. 124-125.



- d. Format rujukan dari makalah seminar/konferensi:** nama penulis, “judul makalah ditulis tegak dalam dua tanda petik,” makalah, nama/tema seminar, tempat pelaksanaan seminar, waktu, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Andrea Ceron dan Alessandra Caterina Cremonesi, “*Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media*,” makalah disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013, h 3.

- e. Format rujukan dari media online:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” nama situs, tanggal akses situs. Contoh:

Berita8, “Media Sosial bisa Perkuat Fungsi Partai Politik”, 18 April 2013, <http://www.berita8.com/berita/2013/04/MediaSosial-bisa-perkuat-fungsi-partai-politik>, diakses pada tanggal 18 Juni 2013.

- f. Format rujukan dari media massa:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber media (*italic*), tanggal terbit, nomor halaman, titik. Contoh:

Degung Santikarma, “Monumen, Dokumen dan Kekerasan Massal,” Kompas, 1 Agustus 2003, h. 12.

10. Penulisan sumber Daftar Pustaka dibedakan menjadi: buku; jurnal; laporan dan makalah; surat kabar dan website. Daftar Pustaka dituliskan dengan urutan abjad nama belakang (*family name*). Format penulisan sebagai berikut:

- a. Format rujukan dari buku:**

Buku dengan satu pengarang: nama penulis; tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Caplan, Bryan. 2007. *The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies*. New Jersey: Princeton University Press.

Buku dengan dua pengarang: nama penulis (dua orang); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Aspinall, E. dan M. Mietzner. 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

Buku dengan lebih dari dua pengarang: nama penulis (et al); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Ananta, Aris, et al., 2004. *Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective*. Singapore: ISEAS Publishing.

Artikel/tulisan dalam buku: nama penulis; tahun terbit; judul tulisan; dalam nama editor; judul buku; tahun terbit; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Qodari, M. 2010. “The Professionalisation of Politics: The Growing Role of Polling Organisation and Political Consultants”, dalam Aspinall, E. dan M. Mietzner (eds.). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

- b. Format rujukan dari jurnal:** nama penulis; tahun; judul artikel; nama jurnal; volume jurnal; nomor jurnal; nomor halaman. Contoh:

Ufen, A. 2008. "From Aliran to Dealignment: Political Parties in post-Suharto Indonesia". *South East Asia Research*, 16 (1): 5-41.

**c. Format rujukan dari laporan dan makalah:**

Laporan penelitian: nama penulis; tahun terbit; judul laporan; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Mainwaring, Scott, 1998. "Rethinking Party Systems Theory In The Third Wave Of Democratization: The Importance of Party System Institutionalization." *Working Paper* #260 - October 1998, Kellogg Institute.

Makalah seminar: nama penulis; tahun terbit; judul makalah; nama kegiatan seminar; waktu pelaksanaan kegiatan seminar; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Ceron, Andrea dan Alessandra Caterina Cremonesi. 2013. "Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media". Paper disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013.

**d. Format rujukan dari surat kabar dan website**

Artikel media massa: nama penulis; tahun terbit; judul artikel; nama media massa; tanggal terbit; nomor halaman. Contoh:

Wahid, Sholahuddin. 1998. "Di Balik Berdirinya Partai-Partai di Kalangan NU," *Republika*, 3 Oktober.

Artikel online: nama penulis/institusi; tahun terbit; judul artikel, alamat websites; waktu unduh. Contoh:

Aspinall, Edward, "The Taming of Ethnic Conflict in Indonesia", dalam <http://www.eastasiaforum.org/2010/08/05/the-taming-of-ethnic-conflict>, diunduh pada 28 November 2013.

**11. Pengiriman Artikel:**

- ✓ Naskah dikirim dalam bentuk *printout* sebanyak 2 eksemplar beserta *softcopy* ke alamat redaksi atau dapat dikirimkan melalui email redaksi ([penerbitan.p2p@gmail.com](mailto:penerbitan.p2p@gmail.com)).
- ✓ Redaksi memberikan honorarium untuk setiap artikel yang dimuat.
- ✓ Artikel yang diterima setelah *deadline* akan dipertimbangkan untuk dimuat pada edisi berikutnya.
- ✓ Artikel dapat dikirimkan melalui website e-journal dengan alamat <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp> dengan cara mendaftar secara *online*.

**12. Alamat Jurnal Penelitian Politik:**

P2P-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III dan XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Fax. (021) 520 7118

**13. Langganan:**

Harga Pengganti ongkos cetak Rp.75.000,- per eksemplar sudah termasuk ongkos kirim biasa. Untuk berlangganan dan surat menyurat langsung hubungi bagian sirkulasi Redaksi Jurnal Penelitian Politik.

# Informasi Hasil Penelitian Terpilih

